

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi, baik sektor swasta maupun sektor publik, memerlukan suatu perencanaan yang matang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan pembangunan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang perencanaan pembangunan secara teratur agar setiap program yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Terry (2020), proses perencanaan adalah cara untuk menetapkan tujuan yang ingin diraih dan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil agar tujuan tersebut tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu organisasi. Melalui perencanaan, organisasi dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menentukan strategi yang akan digunakan, serta mengidentifikasi berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, setiap kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara lebih terarah, sistematis, dan terukur sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun pemborosan sumber daya. Pemahaman terhadap mekanisme penyusunan rencana kerja menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah adalah sektor pariwisata. Menurut Purwahita (2020) peran pariwisata di tingkat nasional semakin menjadi sangat krusial bagi Indonesia. Bidang ini memberikan dampak besar terhadap ekonomi negara. Sektor pariwisata menghasilkan pendapatan asing yang signifikan untuk memperoleh peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. Pembangunan di bidang pariwisata mendorong kemajuan infrastruktur. Sektor ini juga memicu kemajuan di berbagai sektor lainnya. Fandeli (2019) menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan ini seharusnya menjaga lingkungan saat proses pembangunannya, memberdayakan penduduk setempat, melestarikan budaya lokal yang terus berkembang, dan membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya agar semakin maju. pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan sektor pariwisata secara optimal melalui perencanaan kerja yang baik dan terarah.

Kota Padang, yang menjadi pusat Provinsi Sumatera Barat, memiliki banyak potensi pariwisata yang besar untuk dijajaki. Potensi ini meliputi wisata alami, budaya, sejarah, dan kuliner yang menarik perhatian para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa tempat wisata unggulan di Kota Padang antara lain Pantai Padang, Pantai Air Manis, Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya, serta makanan khas Minangkabau, yang semuanya menjadi aset penting untuk mendukung perkembangan industri pariwisata setempat. Tentu saja, potensi ini memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

Dalam upaya mendorong perkembangan sektor wisata, Dinas Pariwisata Kota Padang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan berbagai program serta aktivitas pembangunan pariwisata lokal. Salah satu langkah nyata dari pelaksanaan tanggung jawab ini

adalah dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata setiap tahun anggaran. Menurut Wulandari (2022) Menyatakan bahwa rencana kerja adalah sebuah rencana menyeluruh yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang ada dan yang dapat diperoleh untuk meraih sasaran yang diinginkan di masa yang akan datang. Rencana kerja ini berisi berbagai program, aktivitas, sasaran, indikator hasil, serta kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Penyusunan rencana kerja dilakukan dengan merujuk pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah agar program yang direncanakan bisa sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Menurut Munthe (2023), pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam proses pembangunan karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan program pembangunan daerah. Di samping itu, cara penyusunan rencana kerja juga berfungsi sebagai media untuk menampung usulan dari masyarakat melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah.

Utami (2021) menyatakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD adalah aspek krusial dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa masalah seperti tidak optimalnya sistem perencanaan dan terbatasnya sumber daya pegawai pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan rencana kerja perlu dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Subun (2024) menjelaskan bahwa implementasi rencana kerja pemerintah memerlukan dukungan informasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pembagian tugas yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Dengan adanya kerjasama yang efektif di antara semua pihak yang terlibat, maka rencana yang sudah disusun dapat dijalankan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata Kota Padang menghadapi beragam persoalan dalam pengembangan sektor pariwisata. Salah satu persoalan tersebut adalah usaha untuk memulihkan sektor pariwisata setelah pandemi Covid-19 yang sebelumnya mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan dan berpengaruh pada berkurangnya pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Situasi ini mendorong Dinas Pariwisata Kota Padang untuk merancang rencana kerja yang lebih efisien, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, kemajuan dalam teknologi informasi dan media digital juga berdampak pada cara pelaksanaan program pariwisata. Saat ini, pemasaran wisata tidak hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan juga melalui media sosial dan platform digital yang dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Kota Padang perlu merumuskan rencana kerja yang bisa mengikuti perkembangan teknologi agar promosi pariwisata daerah dapat berjalan dengan lebih efektif.

Mekanisme pembuatan rencana kerja di Dinas Pariwisata Kota Padang perlu memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan wajib memiliki tujuan yang spesifik, sasaran yang terukur, serta alokasi anggaran yang tepat. Dengan adanya mekanisme rencana kerja yang solid,

pelaksanaan program pembangunan pariwisata dapat berlangsung dengan baik dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas penulis tertarik untuk melaksanakan kegiatan magang di DINAS PARIWISATA KOTA PADANG dengan mengangkat judul **“MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme rencana kerja Dinas Pariwisata Kota Padang tahun anggaran 2023?
2. Bagaimanakah hambatan dan kendala dalam mekanisme penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata Kota Padang tahun anggaran 2023?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan masalah – masalah yang di bahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme rencana kerja Dinas Pariwisata Kota Padang tahun anggaran 2023.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam mekanisme rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Padang tahun anggaran 2023.

1.4 Manfaat Magang

Pengharapan dari penulisan yang dilaksanakan ini adalah memberikan beberapa manfaat lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian kinerja keuangan instansi dan membantu dalam mengambil keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

3. Bagi pihak lain

- a) Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.
- b) Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek lapangan.

1.5 Metode Penulisan

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung keinstansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dengan data yang diperlukan.

3. Studi Pustaka

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait dan mengunjungi website yang dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pada program magang ini penulis memilih Dinas Pariwisata Kota Padang di JL. Gandaria No.56, Jati Baru, Kec. Padang Timur., Kota Padang, Sumatra Barat sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, penulis menentukan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dan dasar pemikiran dalam penyusunan laporan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori dan konsep yang menjadi dasar dalam pembahasan laporan. Landasan teori yang digunakan berkaitan dengan manajemen, perencanaan, perencanaan pembangunan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta konsep dan mekanisme penyusunan rencana kerja. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis mekanisme penyusunan rencana kerja pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB III. GAMBARAN UMUM

Mendeskrripsikan gambaran umum tempat magang yaitu Dinas Pariwisata Kota padang.

BAB IV. PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang perlunya dilakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, bagaimanakah perencanaan kebutuhan milik daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang, dan apakah terdapat hambatan dan kendala dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi saran untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya.

